

Pengaruh Akuntabilitas Dan Kompetensi Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa dengan Kompetensi Tim Pengawas APBDes Kecamatan Sebagai Variabel Moderasi

Yeni Martasari¹, Rosidi², Umi Muawanah³

¹Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Gajayana Malang

²Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Gajayana Malang

³Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Gajayana Malang

E-mail: : yenimartasari.unigamalang@gmail.com¹, rosidi@ub.ac.id²,
umimuawanah@unigamalang.ac.id³

Article History:

Received: 25 Februari 2026

Revised: 21 Juni 2026

Accepted: 09 Juli 2026

Keywords: *Accountability, APBDes Team, Moderation, Village Finance, Village Officials*

Abstract: *Penelitian ini menganalisis pengaruh akuntabilitas dan kompetensi perangkat desa terhadap pengelolaan keuangan desa, dengan kompetensi Tim Pengawas APBDes Kecamatan sebagai variabel moderasi di Kabupaten Probolinggo. Menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif dengan metode survei, populasi 201 perangkat desa dari 67 desa di empat kecamatan menghasilkan sampel 109 responden melalui rumus Slovin. Instrumen kuesioner skala Likert dianalisis dengan regresi moderasi (MRA) via SPSS setelah uji validitas, reliabilitas, dan asumsi klasik. Hasil menunjukkan akuntabilitas dan kompetensi perangkat desa berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa ($R^2=91,9\%$). Kompetensi tim pengawas memperlemah pengaruh akuntabilitas, tetapi memperkuat pengaruh kompetensi perangkat desa. Kesimpulan menekankan pelatihan tim kecamatan untuk sinergi pengawasan optimal.*

PENDAHULUAN

Pada periode RPJMN 2024–2029, arah pembangunan nasional kembali menegaskan pendekatan “membangun dari desa” melalui penguatan layanan dasar, infrastruktur, dan pemberdayaan komunitas lokal agar dampaknya lebih merata terhadap penurunan disparitas dan kemiskinan (Peraturan Presiden RI No. 12 Tahun 2025). Sejalan dengan mandat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, alokasi anggaran yang mengalir ke desa menuntut pengelolaan yang tertib, transparan, partisipatif, dan akuntabel agar tujuan pembangunan desa benar-benar terwujud melalui siklus perencanaan sampai pertanggungjawaban (Permendagri No. 20 Tahun 2018; UU No. 28 Tahun 1999). Literatur mutakhir juga menegaskan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah prasyarat tata kelola yang baik, dan kompetensi aparatur menjadi salah satu determinan penting yang konsisten dikaji untuk memperkuat kualitas pengelolaan dana desa (Ningrum, 2024; Dewi et al., 2025).

Dalam praktiknya, fenomena pengelolaan keuangan desa masih menghadapi tantangan

serius karena kapasitas aparatur dan kepatuhan administratif belum sepenuhnya merata, sehingga membuka ruang ketidaktertiban pelaporan maupun risiko penyimpangan dalam penggunaan anggaran desa (Permendagri No. 20 Tahun 2018; Dirjen Bina Pemerintah Desa, 2024). Temuan empiris terbaru di tingkat desa menunjukkan bahwa kompetensi perangkat desa dan kualitas pelaporan serta aksesibilitas laporan berasosiasi positif dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sehingga kelemahan pada aspek-aspek tersebut berpotensi menurunkan kualitas tata kelola (Ningrum, 2024; Dewi et al., 2025). Dengan demikian, penguatan tata kelola keuangan desa tidak cukup hanya bertumpu pada regulasi, tetapi juga membutuhkan kapasitas pelaksana dan mekanisme kontrol yang efektif agar prinsip akuntabilitas bekerja pada seluruh tahapan pengelolaan.

Permasalahan penelitian ini berangkat dari realitas di Kabupaten Probolinggo yang mengindikasikan bahwa akuntabilitas dan kompetensi perangkat desa belum optimal, tercermin antara lain dari masih terbatasnya desa yang menyampaikan laporan keuangan lengkap serta munculnya kasus penyalahgunaan dana desa yang berujung pada proses hukum (Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo, 2024; Arianto, 2025; Musleh, 2025). Kondisi tersebut menguatkan argumen bahwa kualitas pengelolaan keuangan desa sangat dipengaruhi oleh kemampuan aparatur dalam memahami regulasi, menjalankan prosedur, serta menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban secara benar, sebagaimana juga disorot oleh studi-studi kontemporer yang menempatkan kompetensi aparatur sebagai penentu akuntabilitas (Ningrum, 2024; Dewi et al., 2025). Maka, persoalan yang hendak dijelaskan adalah mengapa, di tengah kerangka aturan yang relatif jelas, praktik pengelolaan keuangan desa masih menunjukkan kelemahan pada sisi akuntabilitas dan kompetensi yang berdampak pada mutu pengelolaan.

Permasalahan berikutnya terkait struktur pembinaan dan pengawasan. Dalam sistem pemerintahan daerah, kecamatan melalui camat memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa, termasuk evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes, evaluasi pengelolaan keuangan dan aset, serta evaluasi dokumen laporan pertanggungjawaban (UU No. 23 Tahun 2014; Permendagri No. 73 Tahun 2020). Kabupaten Probolinggo merespons kebutuhan kontrol tersebut dengan membentuk Tim Evaluasi APBDes di tingkat kecamatan sebagai instrumen untuk memperkuat kualitas penganggaran dan pengelolaan keuangan desa. Namun, literatur juga mencatat adanya kontradiksi: kapasitas aparatur desa yang rendah dan pemantauan serta evaluasi yang belum efektif dapat membuat pengelolaan dana desa tidak mencerminkan pengelolaan yang bertanggung jawab (Saputra et al., 2024; Subroto, 2009).

Selain itu, studi-studi terdahulu memperlihatkan hasil yang tidak sepenuhnya konsisten tentang pengaruh kompetensi terhadap akuntabilitas atau pengelolaan dana desa, sehingga masih terdapat celah pengetahuan yang memerlukan penjelasan berbasis konteks (Noholo & Hippy, 2021; Afriansyah & Paddery, 2022; Anggraeni & Yuliani, 2019; Astini & Widowati, 2019). Di sisi lain, riset mutakhir menunjukkan kompetensi aparatur dan pemanfaatan SISKEUDES terbukti meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa, tetapi variabel pengawasan dan gaya kepemimpinan tidak selalu memoderasi hubungan tersebut, sehingga peran pengawasan perlu diuji secara lebih spesifik sesuai desain kelembagaan dan aktor yang relevan (Dewi et al., 2025; Ningrum, 2024). Berangkat dari gap tersebut, penelitian ini memfokuskan masalah pada hubungan akuntabilitas dan kompetensi perangkat desa terhadap pengelolaan keuangan desa, serta menempatkan kompetensi Tim Evaluasi APBDes Kecamatan sebagai faktor yang berpotensi mengubah kekuatan hubungan tersebut dalam konteks Kabupaten Probolinggo.

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh langsung akuntabilitas dan kompetensi

perangkat desa terhadap pengelolaan keuangan desa, serta menguji peran kompetensi Tim Evaluasi APBDes Kecamatan dalam memoderasi hubungan keduanya pada desa-desa di Kecamatan Paiton, Kotaanyar, Besuk, dan Pakuniran Kabupaten Probolinggo. Urgensi penelitian terletak pada kebutuhan memperkuat tata kelola dana desa agar sejalan dengan prinsip akuntabel, transparan, partisipatif, dan disiplin anggaran sesuai regulasi, sekaligus mereduksi risiko ketidaktertiban pelaporan dan penyimpangan yang masih muncul pada level implementasi (Permendagri No. 20 Tahun 2018; UU No. 28 Tahun 1999; Laporan Inspektorat Probolinggo, 2024). Kebaruan penelitian ini adalah memasukkan kompetensi Tim Evaluasi APBDes Kecamatan sebagai variabel moderasi untuk menjelaskan ketidakonsistenan temuan sebelumnya terkait peran kompetensi dan akuntabilitas, sehingga penelitian tidak hanya menguji faktor internal desa, tetapi juga menguji efektivitas aktor pembina-pengawas di level kecamatan sebagai quality control dalam tata kelola keuangan desa (Noholo & Hippy, 2021; Dewi et al., 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif asosiatif dengan metode survei untuk menguji hubungan kausal antara akuntabilitas dan kompetensi perangkat desa terhadap pengelolaan keuangan desa, di mana kompetensi Tim Pengawas APBDes Kecamatan berfungsi sebagai variabel moderasi (Sugiyono, 2021; Sudaryono, 2021). Pendekatan kuantitatif dipilih karena memungkinkan pengukuran variabel secara numerik melalui instrumen terstruktur seperti kuesioner, yang kemudian dianalisis secara statistik untuk menguji hipotesis pengaruh dan moderasi secara objektif dan dapat digeneralisasi ke populasi (Creswell & Creswell, 2023; Emzir, 2023). Metode survei yang digunakan melibatkan pengumpulan data primer dari responden secara langsung di lapangan, sehingga sesuai untuk menggambarkan fenomena pengelolaan keuangan desa di wilayah studi yang melibatkan 67 desa di empat kecamatan Kabupaten Probolinggo.

Instrumen utama penelitian adalah kuesioner berbasis skala Likert 1-5 untuk mengukur persepsi responden terhadap akuntabilitas (X1), kompetensi perangkat desa (X2), pengelolaan keuangan desa (Y), dan kompetensi Tim Pengawas APBDes Kecamatan (Z), dengan data primer dikumpul dari 24 responden Tim Evaluasi APBDes Kecamatan dan 134 perangkat desa, dilengkapi data sekunder dari dokumen pengelolaan keuangan desa (Sugiyono, 2021; Sudaryono, 2021). Teknik pengumpulan data mencakup penyebaran kuesioner, observasi, dan analisis dokumen dari Inspektorat Kabupaten Probolinggo, di mana instrumen diuji validitas dan reliabilitas untuk memastikan kualitas data sebelum analisis lebih lanjut (Emzir, 2023; Creswell & Creswell, 2023). Analisis data dilakukan secara bertahap dengan statistik deskriptif untuk menggambarkan profil responden dan variabel, uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi), serta analisis regresi moderasi (MRA) menggunakan software SPSS untuk menguji pengaruh langsung dan interaksi moderasi secara simultan (Ningrum, 2024; Dewi et al., 2025).

Populasi penelitian terdiri dari 201 perangkat desa yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan di 67 desa pada Kecamatan Paiton, Kotaanyar, Pakuniran, dan Besuk Kabupaten Probolinggo, mencakup kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PKPKD) serta pelaksana seperti sekretaris desa, Kaur keuangan, dan perangkat terkait lainnya (Sugiyono, 2021; Sudaryono, 2021). Sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 5% dan tingkat kepercayaan 95%, menghasilkan ukuran minimal 134 responden perangkat desa, yang kemudian dikembalikan sebanyak 109 setelah distribusi, dengan teknik stratified random sampling berdasarkan strata empat kecamatan untuk

memastikan representativitas (Creswell & Creswell, 2023; Emzir, 2023). Pendekatan ini menjamin sampel representatif dari populasi, sehingga hasil inferensial dapat diterapkan secara umum pada konteks pengelolaan keuangan desa di wilayah tersebut.

Prosedur penelitian dimulai dengan studi pendahuluan untuk identifikasi masalah dan kerangka konseptual, dilanjutkan penyusunan instrumen kuesioner berdasarkan indikator variabel yang telah diuji validitas dan reliabilitas, serta distribusi kuesioner ke responden Tim Evaluasi APBDes Kecamatan dan perangkat desa secara langsung di lapangan (Sugiyono, 2021; Sudaryono, 2021). Selanjutnya, data dikumpul dan dibersihkan, diikuti pengujian asumsi klasik sebelum melakukan analisis regresi moderasi untuk menguji hipotesis pengaruh akuntabilitas (X1), kompetensi perangkat desa (X2), dan interaksi moderasi dengan kompetensi Tim Pengawas APBDes (Z) terhadap pengelolaan keuangan desa (Y), dengan uji signifikansi model dan koefisien determinasi (R^2) untuk mengevaluasi kekuatan model (Dewi et al., 2025; Ningrum, 2024). Proses ini dilakukan secara sistematis di lokasi penelitian selama periode yang direncanakan, memastikan etika penelitian seperti kerahasiaan responden dan akurasi data terjaga sepanjang tahapan (Creswell & Creswell, 2023; Emzir, 2023).

HASIL

Karakteristik Responden Tim Evaluasi APBDes Kecamatan

Tabel 1. Karakteristik Tim Evaluasi APBDes Kecamatan berdasarkan Jabatan

NO	JABATAN	JUMLAH RESPONDEN	PERSENTASE
1.	Sekretaris Kecamatan	2 orang	10 %
2.	Kasi Pemerintahan	3 orang	15 %
3.	Kasi Kesejahteraan Rakyat	4 orang	20 %
4.	Kasi Perekonomian dan Pembangunan	4 orang	20 %
5.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	3 orang	15 %
6.	Staf	4 orang	20 %
TOTAL		20 orang	100 %

Sumber: data primer diolah, tahun 2025

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa persentase responden dengan jabatan Sekretaris Kecamatan hanya 10% yang berarti sebanyak 2 (dua) orang. Kemudian persentase responden dengan jabatan Kasi Pemerintahan, serta Kasi Ketentraman dan Ketertiban sebesar 15% yang berarti masing – masing sebanyak 3 (tiga) orang. Terakhir persentase responden dengan jabatan Kasi Kesejahteraan Rakyat, Kasi Perekonomian dan Pembangunan, serta Staf sebesar 20% yang berarti masing – masing sebanyak 4 (empat) orang.

Tabel 2. Karakteristik Tim Evaluasi APBDes Kecamatan berdasarkan Pendidikan Terakhir

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH RESPONDEN	PERSENTASE
1.	Strata 2	7 orang	35 %
2.	Strata 1	12 orang	60 %
3.	Setingkat SMA	1 orang	5 %
TOTAL		20 orang	100 %

Sumber: data primer diolah, tahun 2025

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa persentase responden dengan pendidikan terakhir setingkat SMA hanya 5% yang berarti sebanyak 1 (satu) orang. Kemudian persentase responden dengan pendidikan terakhir Strata 2 sebesar 35% yang berarti sebanyak 7 (tujuh) orang. Persentase terbesar adalah responden dengan pendidikan terakhir Strata 1 sebesar 60% yang berarti sebanyak 12 (duabelas) orang.

Untuk pendidikan terakhir Strata 1 diperoleh data bahwa Tim Evaluasi APBDes Kecamatan lulusan Sarjana Ilmu Ekonomi sebanyak 3 orang, sedangkan sisanya berasal dari jurusan non ilmu ekonomi, yaitu ilmu bisnis, ilmu hukum, ilmu komputer, ilmu pemerintahan, ilmu pertanian, ilmu sosial politik dan PGSD. Hal tersebut tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 3. Karakteristik Tim Evaluasi APBDes Kecamatan Berdasarkan Jurusan Strata 1

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH RESPONDEN	PERSENTASE
1.	Ilmu Sosial Politik	6 orang	30 %
2.	Ilmu Ekonomi	3 orang	15 %
3.	Ilmu Hukum	3 orang	15 %
4.	Ilmu Pemerintahan	2 orang	10%
5.	Ilmu Pertanian	2 orang	10%
6.	Ilmu Bisnis	1 orang	5 %
7.	Ilmu Komputer	1 orang	5 %
8.	PGSD	1 orang	5 %
9.	Setingkat SMA	1 orang	5 %
TOTAL		20 orang	100 %

Sumber: data primer diolah, tahun 2025

Tabel 4. Karakteristik Tim Evaluasi APBDes Kecamatan berdasarkan Keikutsertaan dalam Pelatihan

NO	KEIKUTSERTAAN PELATIHAN	JUMLAH RESPONDEN	PERSENTASE
1.	PERNAH	11 orang	55 %
2.	TIDAK PERNAH	9 orang	45 %
TOTAL		20 orang	100 %

Sumber: data primer diolah, tahun 2025

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa persentase responden yang pernah mengikuti pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa lebih besar daripada yang tidak pernah. Tim Evaluasi APBDes Kecamatan yang pernah mengikuti pelatihan sebanyak 11 orang (55%), sedangkan yang tidak pernah mengikuti pelatihan sebanyak 9 orang (45%).

Jumlah pelatihan yang diikuti paling banyak hanya 1 kali, yaitu 5 orang dengan persentase 46%. Kemudian 2 kali pelatihan sebanyak 4 orang dengan persentase 36%, serta untuk 3 dan 4 kali pelatihan masing – masing sebanyak 1 orang dengan persentase 9%. Hal tersebut tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 5. Karakteristik Tim Evaluasi APBDes Kecamatan berdasarkan Jumlah Pelatihan yang Diikuti

NO	JUMLAH PELATIHAN	JUMLAH RESPONDEN	PERSENTASE
1.	1 KALI	5 orang	46 %
2.	2 KALI	4 orang	36 %
3.	3 KALI	1 orang	9 %
4.	4 KALI	1 orang	9 %
TOTAL		11 orang	100 %

Sumber: data primer diolah, tahun 2025

Tabel 6. Karakteristik Tim Evaluasi APBDes Kecamatan berdasarkan Jumlah Pelatihan yang Diikuti

NO	JUMLAH PELATIHAN	JUMLAH RESPONDEN	PERSENTASE
1.	1 TAHUN	2 orang	10 %

2.	2 TAHUN	7 orang	35 %
3.	3 TAHUN	3 orang	15 %
4.	4 TAHUN	3 orang	15 %
5.	5 TAHUN	3 orang	15 %
6.	7 TAHUN	1 orang	5 %
7.	10 TAHUN	1 orang	5 %
TOTAL		20 orang	100 %

Sumber: data primer diolah, tahun 2025

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa responden yang sudah bekerja sebagai Tim Evaluasi APBDes Kecamatan selama 7 dan 10 tahun sebesar 5% yang berarti hanya 1 orang. Sedangkan yang sudah bekerja selama 1 tahun sebesar 10% yang berarti hanya 2 orang. Responden yang sudah bekerja sebagai Tim Evaluasi APBDes Kecamatan selama 3, 4 dan 5 tahun adalah sebesar 15% yang berarti hanya 3 orang, serta persentase terbesar sebanyak 35% yang berarti 7 orang adalah responden yang sudah bekerja sebagai Tim Evaluasi APBDes Kecamatan selama 2 tahun.

Karakteristik Responden Perangkat Desa

1. Jabatan

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa persentase responden dengan jabatan Kepala Desa sebesar 24% yang berarti sebanyak 26 (dua puluh enam) orang. Kemudian persentase responden dengan jabatan Sekretaris Desa sebesar 28% yang berarti sebanyak 30 (tiga puluh) orang. Persentase responden dengan jabatan Kaur Keuangan Desa sebesar 32% yang berarti sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang dan persentase responden dengan jabatan lainnya sebesar 16% yang berarti sebanyak 18 orang. Hal tersebut tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 7. Karakteristik Perangkat Desa berdasarkan Jabatan

NOJABATAN	JUMLAH RESPONDEN	PERSENTASE
1. Kepala Desa	26 orang	24 %
2. Sekretaris Desa	30 orang	28 %
3. Kaur Keuangan Desa	35 orang	32 %
4. Lainnya	18 orang	16 %
TOTAL	109 orang	100 %

Sumber: data primer diolah, tahun 2025

2. Pendidikan Terakhir

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa persentase responden dengan pendidikan terakhir Strata 1 dan setara SMA adalah sama, yaitu 50%. Perangkat Desa dengan pendidikan terakhir Strata 1 sebanyak 54 orang, sedangkan Perangkat Desa dengan pendidikan terakhir setingkat SMA sebanyak 55 orang. Hal tersebut tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 8. Karakteristik Perangkat Desa berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir

NO	JABATAN	JUMLAH RESPONDEN	PERSENTASE
1.	Strata 1	54 orang	50 %
2.	Setara SMA	55 orang	50 %
TOTAL		109 orang	100 %

Sumber: data primer diolah, tahun 2025

3. Status Pelatihan

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa persentase Perangkat Desa yang pernah mengikuti pelatihan lebih besar daripada Perangkat Desa yang tidak pernah mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan Desa. Perangkat Desa yang pernah mengikuti pelatihan sebanyak 101 orang (93%),

sedangkan Perangkat Desa yang tidak pernah mengikuti pelatihan hanya 8 orang (7%). Hal tersebut tergambar dalam diagram berikut

Tabel 9. Karakteristik Perangkat Desa berdasarkan Keikutsertaan dalam Pelatihan

NO	KEIKUTSERTAAN PELATIHAN	DALAMJUMLAH RESPONDEN	PERSENTASE
1.	PERNAH	101 orang	93%
2.	TIDAK PERNAH	8 orang	7 %
TOTAL		109 orang	100 %

Sumber: data primer diolah, tahun 2025

Jumlah pelatihan pengelolaan keuangan Desa yang diikuti Perangkat Desa tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 10. Jumlah Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa Yang Diikuti Perangkat Desa

NO	JUMLAH PELATIHAN	JUMLAH RESPONDEN	PERSENTASE
1.	1 KALI	4 orang	3,96 %
2.	2 KALI	21 orang	20,79 %
3.	3 KALI	13 orang	12,87 %
4.	4 KALI	11 orang	10,89 %
5.	5 KALI	8 orang	7,92 %
6.	6 KALI	3 orang	2,97 %
7.	7 KALI	2 orang	1,98 %
8.	8 KALI	14 orang	13,86 %
9.	9 KALI	6 orang	5,94 %
10.	10 KALI	17 orang	16,83 %
11.	13 KALI	1 orang	0,99 %
12.	15 KALI	1 orang	0,99 %
TOTAL		101 orang	100 %

Sumber: data primer diolah, tahun 2025

4. Lama Bekerja

Hasil kuesioner menunjukkan Perangkat Desa yang sudah bekerja di Pemerintahan Desa memiliki rentang waktu antara 2 – 39 tahun. Hal ini dapat terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 11. Lama Bekerja sebagai Perangkat Desa

NO	LAMA BEKERJA	JUMLAH RESPONDEN	PERSENTASE
1.	2 TAHUN	7 orang	6,42 %
2.	3 TAHUN	18 orang	16,51 %
3.	4 TAHUN	7 orang	6,42 %
4.	5 TAHUN	18 orang	16,51 %
5.	7 TAHUN	4 orang	3,67 %
6.	8 TAHUN	20 orang	18,35 %
7.	9 TAHUN	1 orang	0,92 %
8.	10 TAHUN	23 orang	21,10 %
9.	11 TAHUN	1 orang	0,92 %
10.	13 TAHUN	1 orang	0,92 %
11.	15 TAHUN	4 orang	3,67 %
12.	22 TAHUN	1 orang	0,92 %
13.	25 TAHUN	2 orang	1,83 %
14.	28 TAHUN	1 orang	0,92 %
15.	39 TAHUN	1 orang	0,92 %

TOTAL 109 orang

*Sumber: data primer diolah, tahun 2025***Statistik Deskriptif Variabel Penelitian****Tabel 12. Kriteria Pengelompokan Berdasarkan Rata Rata**

Skala Nilai Rata Rata	Kriteria/Kategori
1-1,8	Sangat Tidak Setuju/ Sangat Tidak Baik
1,81 - 2,6	Tidak Setuju/ Tidak Baik
2,61- 3,4	Netral/ Cukup
3,41 – 4,2	Setuju/ Baik
4,21 – 5	Sangat Setuju/ Sangat Baik

*Sumber: data primer diolah, tahun 2025***Tabel 13. Output Deskripsi Statistik Variabel Penelitian**

NoVariabel	N	Min	Max	Mean	Std.Dev
1. Akuntabilitas (X1)	109	1.805	5.00	4.25	1.4072796
2. Kompetensi Perangkat Desa (X2)	109	1.805	5.00	4.02	3.9062107
3. Pengelolaan Keuangan Desa (Y)	109	1.805	5.00	4.23	670.79076
4. Kompetensi tim pengawas APBDes Kecamatan (Z)	109	1.905	5.00	4.02	570.73035

Sumber Data Primer Diolah Tahun 2025

Secara umum, statistik deskriptif menunjukkan nilai rata-rata semua variabel (akuntabilitas, kompetensi perangkat desa, pengelolaan keuangan desa, dan kompetensi Tim APBDes Kecamatan) di atas 4,00 pada skala 1–5, dengan minimum tinggi, maksimum 5,00, dan standar deviasi di bawah 1,00. Hal ini mengindikasikan persepsi responden yang positif, homogen, dan konsisten terhadap praktik pengelolaan serta pengawasan keuangan desa, sehingga analisis lebih detail per variabel diperlukan untuk gambaran spesifik.

1. Variabel Akuntabilitas (X1)**Tabel 14. Statistik Deskriptif Variabel Akuntabilitas (X1)**

No.Pernyataan	Mean	Kriteria/ Kategori
1. Masyarakat Desa aktif mengikuti Musyawarah Desa	4.176	Setuju/ Baik
2. Informasi Keuangan Desa mudah diakses oleh Masyarakat Desa	4.202	Setuju/ Baik
3. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran disampaikan tepat waktu oleh kepala desa kepada bupati melalui camat secara tertulis	3.972	Setuju/ Baik
4. Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran disampaikan tepat waktu oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis	4.092	Setuju/ Baik
5. Pengelolaan Keuangan Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa	4.275	Sangat Setuju/ Sangat Baik
Mean Total Variabel	4.251	Sangat Setuju/ Sangat Baik

Sumber : Data Primer diolah 2025

Variabel akuntabilitas memiliki mean total 4,251 (sangat baik), dengan indikator partisipasi masyarakat (4,176), transparansi informasi (4,202), pelaporan tepat waktu ke bupati (3,972) dan BPD (4,092), serta kepatuhan Permendagri No. 20/2018 tertinggi (4,275). Secara keseluruhan, aspek partisipasi, transparansi, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa berada pada kategori sangat baik.

2. Variabel Kompetensi Perangkat Desa (X2)

Tabel 15. Statistik Deskriptif Variabel Kompetensi Perangkat Desa (X2)

No.Pernyataan	MeanKriteria/ Katagori
1. Saya mampu mengoperasikan SISKEUDES	3.312 Setuju/ Baik
2. Saya mampu menyusun APBDes sesuai regulasi	4.138 Setuju/ Baik
3. Saya melaksanakan APBDes yang telah ditetapkan	4.202 Setuju/ Baik
4. Saya selalu menghadiri undangan Kecamatan / Kabupaten yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Desa	4.514 Setuju/ Baik
5. Saya memahami Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Desa	3.954 Sangat Setuju/ Sangat Baik
Mean Total	4.024 Setuju/ Baik

Sumber : Data Primer diolah Tahun 2025

3. Variabel Pengelolaan Keuangan Desa

Tabel 16. Statistik Deskriptif Variabel Pengelolaan Keuangan Desa

No.Pernyataan	Mean Kriteria/ Katagori
1. Perencanaan Keuangan Desa disusun dengan melibatkan partisipasi masyarakat	4.670 Sangat Setuju/ Sangat Baik
2. Pelaksanaan Anggaran Desa sesuai dengan APBDes	4.257 Sangat Setuju/ Sangat Baik
3. Penatausahaan Keuangan Desa dilakukan secara tertib dan tepat waktu	3.972 Setuju/ Baik
4. Laporan Keuangan Desa dibuat secara lengkap dan akurat	3.991 Setuju/ Baik
5. Pemerintah Desa secara rutin menyampaikan laporan realisasi anggaran kepada BPD dan masyarakat	4.294 Sangat Setuju/ Sangat Baik
Mean Total Variabel	4.237 Sangat Setuju/ Sangat Baik

Sumber : Data Primer diolah Tahun 2025

Variabel pengelolaan keuangan desa memiliki mean total 4,237 (sangat baik), menunjukkan pelaksanaan yang optimal sesuai prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Indikator perencanaan tertinggi (4,670), pelaksanaan anggaran (4,257) dan pertanggungjawaban (4,294) sangat baik, sementara penatausahaan (3,972) dan pelaporan (3,991) kategori baik dengan ruang perbaikan.

4. Variabel Kompetensi Tim Pengawas APBDes Kecamatan (Z)

Tabel 17. Statistik Deskriptif Variabel Kompetensi Tim Pengawas APDes

No.Pernyataan	MeanKriteria/ Katagori
1. Tim Evaluasi APBDes Kecamatan memiliki pemahaman yang baik tentang regulasi keuangan desa	4.138 Setuju /Baik
2. Tim Evaluasi APBDes Kecamatan mampu memberikan solusi atas permasalahan teknis pengelolaan keuangan desa	4.055 Setuju /Baik
3. Tim Evaluasi APBDes Kecamatan memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan perangkat desa	4.128 Setuju/ Baik
4. Tim Evaluasi APBDes Kecamatan responsif dalam menangani pengaduan dari desa	3.991 Setuju/ Baik
5. Tim Evaluasi APBDes Kecamatan bekerja secara professional dan tidak memihak	4.037 Setuju /Baik
6. Tim Evaluasi APBDes Kecamatan rutin memberikan sosialisasi pengelolaan keuangan desa	3.936 Setuju /Baik
7. Tim Evaluasi APBDes Kecamatan memfasilitasi pelatihan teknis kepada perangkat desa	3.872 Setuju /Baik
8. Tim Evaluasi APBDes Kecamatan memfasilitasi kerjasama antar desa	3.853 Setuju /Baik
9. Tim Evaluasi APBDes Kecamatan aktif dalam Musyawarah Desa	4.541 Sangat Setuju/ Sangat Baik

10 Surat Edaran Kabupaten Probolinggo tentang Keuangan Desa mudah dipahami	4.174Setuju /Baik
11 Tim Evaluasi APBDes Kecamatan rutin melakukan monitoring APBDes	3.963Setuju /Baik
12 Tim Evaluasi APBDes Kecamatan memeriksa kelengkapan dokumen pertanggung-jawaban	4.174Setuju /Baik
13 Tim Evaluasi APBDes Kecamatan melakukan tinjau lapang atas pekerjaan fisik di desa	3.486Setuju /Baik
14 Tim Evaluasi APBDes Kecamatan memberikan rekomendasi apabila ditemukan ketidaksesuaian pertanggung- jawaban desa	3.991Setuju /Baik
15 Rekomendasi penyaluran dana berdasarkan evaluasi obyektif	4.138Setuju /Baik
Mean Total Variabel	4.025Setuju /Baik

Sumber : Data Primer diolah Tahun 2025

Variabel kompetensi Tim Pengawas APBDes Kecamatan memiliki mean total 4,024 (baik), menunjukkan kecukupan dalam evaluasi, pembinaan, dan pengawasan keuangan desa. Indikator keaktifan di Musyawarah Desa tertinggi (4,541; sangat baik), sementara pemahaman regulasi, komunikasi, objektivitas, monitoring, dan pemeriksaan baik; namun tinjau lapangan dan fasilitasi pelatihan perlu ditingkatkan.

Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Tabel 18. Distribusi Item Variabel

No	Variabel	Nomor Item
1	Akuntabilitas (X1)	1, 2, 3, 4, 5
2	Kompetensi Perangkat Desa (X2)	6, 7, 8, 9, 10
3	Pengelolaan Keuangan Desa (Y)	11, 12, 13, 14, 15
4	Kompetensi Tim Pengawas APBDes Kecamatan (Z)	16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Sumber: data primer diolah, tahun 2025

Hasil uji validitas menggunakan bantuan *software* SPSS dengan nilai *pearson correlation* setiap *item* pada variabel dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 19. Hasil Uji Validitas Kuesioner

Variabel		ItemPearson Correlation			Nilai Signifikansi	Keterangan
		R hitung	R tabel			
Akuntabilitas (X1)	1	0,547	0,237	0,000		Valid
	2	0,915	0,237	0,000		Valid
	3	0,918	0,237	0,000		Valid
	4	0,946	0,237	0,000		Valid
	5	0,883	0,237	0,000		Valid
Kompetensi Perangkat Desa (X2)	1	0,513	0,237	0,000		Valid
	2	0,862	0,237	0,000		Valid
	3	0,813	0,237	0,000		Valid
	4	0,465	0,237	0,000		Valid
	5	0,865	0,237	0,000		Valid
Pengelolaan Keuangan Desa (Y)	1	0,589	0,237	0,000		Valid
	2	0,922	0,237	0,000		Valid
	3	0,939	0,237	0,000		Valid
	4	0,947	0,237	0,000		Valid
	5	0,876	0,237	0,000		Valid
Kompetensi Tim Pengawas APBDes (Z)	1	0,763	0,237	0,000		Valid
	2	0,814	0,237	0,000		Valid
	3	0,839	0,237	0,000		Valid

4	0,879	0,237	0,000	Valid
5	0,853	0,237	0,000	Valid
6	0,841	0,237	0,000	Valid
7	0,829	0,237	0,000	Valid
8	0,835	0,237	0,000	Valid
9	0,476	0,237	0,000	Valid
10	0,803	0,237	0,000	Valid

Berdasarkan hasil pada Tabel di atas. dapat dilihat bahwa seluruh *item* pada setiap variabel memiliki nilai signifikansi $< 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh *item* pada variabel Akuntabilitas (X1), Kompetensi Perangkat Desa (X2), dan Kompetensi Tim Pengawas APBDes Kecamatan (Z) dapat dinyatakan **valid** sehingga dapat dilanjutkan ke uji reliabilitas instrumen penelitian.

2. Uji Reliabilitas

Tabel 20. Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Akuntabilitas (X1)	0,906	Reliabel
Kompetensi Perangkat Desa (X2)	0,749	Reliabel
Pengelolaan Keuangan Desa (Y)	0,915	Reliabel
Kompetensi Tim Pengawas APBDes Kecamatan (Z)	0,949	Reliabel

Sumber: data primer diolah, tahun 2025

Berdasarkan perhitungan pada tabel diatas, variabel X1, X2, Y dan Z diperoleh nilai *cronbach's alpha* lebih dari 0,60. Dengan demikian keempat variabel penelitian dapat dinyatakan **reliabel**. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen penelitian yang digunakan terbukti konsisten dan dapat dipercaya. Dengan demikian, instrumen penelitian dalam penelitian ini telah memenuhi syarat validitas dan reliabilitas.

Uji Asumsi Klasik

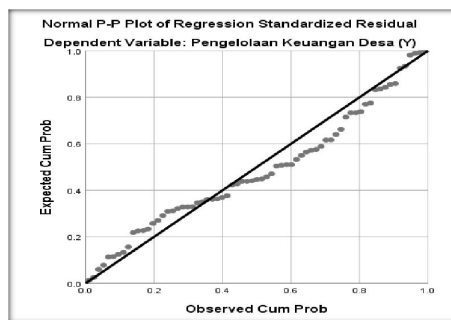
1. Uji Normalitas

Tabel 21. Hasil Uji Normalitas

Kolmogorov Smirnov Test	
Tes Statistik	Nilai Signifikansi
0,104	0,064
data berdistribusi normal	

Sumber: data primer diolah, tahun 2025

Berdasarkan hasil pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi memiliki nilai 0,064 yang berarti lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data pada residual berdistribusi normal. Sedangkan visualisasi data dapat terlihat pada gambar plot di bawah ini, dimana terlihat lingkaran hitam berada disekitar garis lurus. Hal ini mengindikasikan bahwa data berdistribusi normal.

**Gambar 1. Visualisasi Grafik Normalitas***Sumber: data primer diolah, Tahun 2025***2. Uji Multikolinieritas**

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas, seluruh variabel pada penelitian ini diperoleh nilai VIF sebesar < 10 , maka dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini tidak terdapat gejala multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas penelitian ini tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 22. Hasil Uji Multikolinieritas

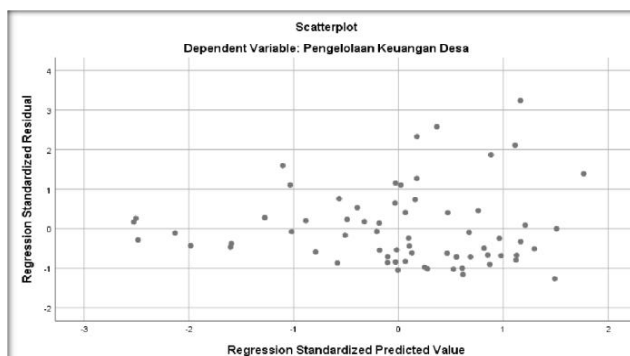
Variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Akuntabilitas (X1)	0,352	2,842
Kompetensi Perangkat Desa (X2)	0,356	2,805
Kompetensi Tim Pengawas APBDes (Z)	0,934	1,071
Akuntabilitas dengan moderasi (X1Z)	0,262	3,824

*Sumber: data primer diolah, tahun 2025***3. Uji Heteroskedastisitas****Tabel 23. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Variabel	Uji Glejser	
	t	Nilai Signifikansi
Akuntabilitas (X1)	-1,968	0,054
Kompetensi Perangkat Desa (X2)	1,394	0,168
Kompetensi Tim Pengawas APBDes (Z)	1,159	0,251
Akuntabilitas dengan moderasi (X1Z)	0,123	0,902
Kompetensi Perangkat Desa dengan moderasi (X2Z)	0,174	0,863

Sumber: data primer diolah, tahun 2025

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas, seluruh variabel diperoleh nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Visualisasi dapat dilihat pada *scatter plot* di bawah ini, terlihat titik hitam menyebar secara acak dan tidak berpola, hal ini mengindikasikan bahwa pada data tidak ada heteroskedastisitas. Hasil uji multikolinieritas penelitian ini tergambar dalam tabel berikut :



Gambar 2. Visualisasi Grafik Normalitas*Sumber: Data Primer diolah, Tahun 2025***4. Uji Autokorelasi****Tabel 24. Hasil Uji Autokorelasi**

Run Test	
Test Statistics	Nilai Signifikansi
1,579	0,114

Sumber: data primer diolah, 2025

Berdasarkan hasil pada tabel diatas, diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,114 > 0,05 (\alpha)$, maka dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini tidak terdapat autokorelasi.

Dengan dilakukannya keempat uji asumsi dengan hasil menunjukkan bahwa residual data berdistribusi normal, tidak ada multikolinieritas, tidak ada heteroskedastisitas dan tidak ada autokorelasi dalam data. Dengan demikian, data telah memenuhi asumsi dan dapat dilanjutkan analisis selanjutnya yakni analisis regresi moderasi.

Analisis Regresi Moderasi

Analisis regresi moderasi digunakan untuk menguji apakah variabel Z (Kompetensi Tim Pengawas APBDes Kecamatan) memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel X (Akuntabilitas dan Kompetensi Perangkat Desa) terhadap variabel Y (Pengelolaan Keuangan Desa). Persamaan regresi moderasi yang digunakan yakni sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 (X_1 * Z) + \beta_4 (X_2 * Z) + \varepsilon$$

Setelah semua asumsi klasik terpenuhi, maka dapat dilakukan uji hipotesis untuk melihat pengaruh setiap variabel. Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan uji F secara simultan, uji t secara parsial, dan koefisien determinasi. Adapun hipotesis yang diajukan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : Akuntabilitas berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

H2 : Kompetensi Perangkat Desa berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

H3 : Kompetensi Tim Pengawas APBDes Kecamatan memoderasi hubungan Akuntabilitas dengan Pengelolaan Keuangan Desa

H4 : Kompetensi Tim Pengawas APBDes Kecamatan memoderasi hubungan Perangkat Desa dengan Pengelolaan Keuangan Desa

Adapun hasil olah data untuk penelitian ini dengan menggunakan SPSS disajikan pada tabel 25 berikut:

Tabel 25. Hasil Uji Hipotesis Regresi Moderasi

Variabel	Uji Parsial		Uji Simultan		Koefisien Determinasi (R ²)
	Koefisien Regresi (β)	T	Nilai Signifikasi	F	
Akuntabilitas (X1)	0,699	11,863	0,000		
Kompetensi Perangkat Desa (X2)	0,274	4,631	0,000		
Kompetensi Tim Pengawas APBDes Kecamatan (Z)				143,365	0,919
Evaluasi APBDes Kecamatan	0,020	0,505	0,615	(0,000)	(91,9%)
Akuntabilitas dengan moderasi	-0,229	-2,902	0,005		

(X1Z)

Kompetensi Perangkat Desa dengan moderasi

0,178 2,178 0,033

(X2Z)

*Sumber: data primer diolah, tahun 2025***1. Koefisien Determinasi R²**

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan keragaman variabel dependen. Nilai R² berkisar antara 0 hingga 1. Hasil pada perhitungan SPSS diperoleh nilai R² sebesar 0,919 yang mengartikan bahwa 91,9% variasi variabel dependen dipengaruhi oleh variabel-variabel bebas di dalam model sedangkan 8,1% sisanya dipengaruhi faktor lain diluar model.

Uji Hipotesis**Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (H1)**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperoleh nilai koefisien $\beta_1 = 0,699$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ (α). Hal ini menunjukkan bahwa Hipotesis 1 diterima yang berarti **akuntabilitas (X1) berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa (Y)**. Peningkatan akuntabilitas akan meningkatkan pengelolaan keuangan desa.

Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (H2)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperoleh nilai koefisien $\beta_2 = 0,274$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ (α). Hal ini menunjukkan bahwa Hipotesis 2 diterima yang berarti **kompetensi perangkat desa (X2) berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa (Y)**. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kompetensi perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan kompetensi aparatur desa secara langsung mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa.

Pengaruh Akuntabilitas dengan moderasi Kompetensi Tim Pengawas APBDes Kecamatan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (H3)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperoleh nilai koefisien $\beta_3 = -0,229$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,005 < 0,05$ (α). Koefisien interaksi bernilai negatif dan signifikan menunjukkan bahwa Kompetensi Tim Evaluasi APBDes Kecamatan berperan sebagai moderator yang memperlemah (*weakening moderator*) hubungan antara Akuntabilitas (X1) dan Pengelolaan Keuangan Desa (Y) Sehingga H3 ditolak. Kondisi ini mengindikasikan bahwa semakin kuat peran Tim Pengawas APBDes (Z), mekanisme akuntabilitas internal desa menjadi lebih dikendalikan secara struktural sehingga pengaruh langsung akuntabilitas terhadap kinerja keuangan desa menjadi berkurang.

Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa dengan moderasi Tim Evaluasi APBDes Kecamatan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (H4)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperoleh nilai koefisien $\beta_4 = 0,178$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,033 < 0,05$ (α). Hal ini menunjukkan bahwa Hipotesis 4 (H4) diterima yang berarti Kompetensi Tim Pengawas APBDes Kecamatan (Z) berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa (X2) terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Y).

PEMBAHASAN

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin baik penerapan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka semakin baik pula kualitas pengelolaan keuangan desa yang mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip utama dalam konsep *good governance* yang menekankan kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan setiap penggunaan dana publik kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya. Penerapan akuntabilitas yang baik akan mendorong keteraturan administrasi keuangan desa serta meminimalkan potensi penyimpangan dalam pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Selva Temalagi dan Revi W. Silooy (2022) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa dalam rangka mewujudkan *good governance*. Temuan ini juga didukung oleh Faizzatus Solihah dan Biana Adha Inapty (2022) yang membuktikan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat temuan empiris sebelumnya bahwa akuntabilitas merupakan faktor kunci dalam pengelolaan keuangan desa yang efektif dan bertanggung jawab.

Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Temuan ini menunjukkan bahwa perangkat desa yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan teknis yang memadai akan lebih mampu melaksanakan pengelolaan keuangan desa secara profesional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kompetensi perangkat desa berperan penting dalam memahami regulasi keuangan desa, menyusun laporan keuangan, serta mengoperasikan sistem informasi pengelolaan keuangan desa. Perangkat desa yang kompeten akan mampu mengelola dana desa secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Yusranda Saputra, Meita Sekar Sari, dan Darwin Warisi (2024) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Temuan ini juga memperkuat hasil penelitian Hanif Dwi Kuncahyo dan I Gede Made Artha Dharmakarja (2022) yang menyimpulkan bahwa kompetensi aparat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, peningkatan kompetensi perangkat desa merupakan faktor strategis dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa.

Peran Moderasi Kompetensi Tim Pengawas APBDes Kecamatan pada Hubungan Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi Tim Pengawas APBDes Kecamatan memoderasi hubungan **antara** akuntabilitas dan pengelolaan keuangan desa dengan arah negatif. Temuan ini menunjukkan bahwa kompetensi tim pengawas berperan sebagai variabel moderasi yang memperlemah pengaruh langsung akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa.

Kondisi ini dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi kompetensi tim pengawas kecamatan, maka fungsi pengawasan dan pengendalian eksternal terhadap desa menjadi semakin kuat.

Akibatnya, pengelolaan keuangan desa tidak hanya bergantung pada mekanisme akuntabilitas internal desa, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh arahan, evaluasi, dan pengendalian dari pihak kecamatan. Hal ini menyebabkan pengaruh langsung akuntabilitas internal desa terhadap pengelolaan keuangan menjadi relatif berkurang.

Temuan ini relevan dengan penelitian Prita Dilla Anggraeni dan Nur Laila Yuliani (2019) yang menemukan bahwa pengawasan tidak selalu memperkuat hubungan kompetensi dan peran perangkat desa terhadap pengelolaan keuangan desa. Selain itu, hasil ini juga mendukung kajian Muhammad Khabib Al Ma'ruf et al. (2024) yang menyatakan bahwa keterbatasan kapasitas aparatur dan dominasi pengendalian struktural dapat memengaruhi efektivitas penerapan prinsip *good governance* di tingkat desa.

Peran Moderasi Kompetensi Tim Pengawas APBDes Kecamatan pada Hubungan Kompetensi Perangkat Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi Tim Pengawas APBDes Kecamatan berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat pengaruh kompetensi perangkat desa terhadap pengelolaan keuangan desa. Temuan ini menunjukkan bahwa kompetensi perangkat desa akan memberikan dampak yang lebih optimal apabila didukung oleh tim pengawas kecamatan yang memiliki kemampuan teknis dan pemahaman regulasi yang baik.

Peran tim pengawas kecamatan tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pembina dan pendamping bagi perangkat desa. Pembinaan yang efektif akan membantu perangkat desa dalam menerapkan kompetensinya secara lebih tepat dalam pengelolaan keuangan desa.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Berlian Afriansyah, Meriana, dan Paddery (2022) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Temuan ini juga diperkuat oleh Anita et al. (2025) yang menegaskan bahwa penerapan prinsip *good governance*, termasuk pembinaan dan pengawasan, berkontribusi positif terhadap tata kelola pemerintahan desa.

Implikasi Teoretis dan Empiris

Secara teoretis, hasil penelitian ini memperkuat konsep *good governance* yang menekankan pentingnya akuntabilitas, kompetensi aparatur, dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini juga memberikan kontribusi empiris terkait peran moderasi kompetensi tim pengawas kecamatan yang memiliki pengaruh berbeda pada hubungan antar variabel.

Secara empiris, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan pengelolaan keuangan desa tidak hanya bergantung pada kompetensi dan akuntabilitas internal desa, tetapi juga memerlukan sinergi dengan peran pembinaan dan pengawasan dari pemerintah kecamatan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa akuntabilitas dan kompetensi perangkat desa berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa, dengan model regresi menjelaskan 91,9% variasi. Kompetensi Tim Pengawas APBDes Kecamatan memoderasi secara berbeda: memperlemah pengaruh akuntabilitas, tetapi memperkuat pengaruh kompetensi perangkat desa, menegaskan sinergi pembinaan eksternal untuk tata kelola optimal. Statistik deskriptif juga mengonfirmasi persepsi responden positif terhadap semua variabel (mean >4,00), meski penatausahaan dan tinjau lapangan memerlukan perbaikan.

Meski demikian, keterbatasan meliputi tingkat respons rendah (109 dari 134 kuesioner) dan ruang lingkup terbatas pada empat kecamatan Probolinggo, sehingga generalisasi perlu hati-hati; pendekatan kuantitatif juga kurang menggali dinamika kualitatif. Saran untuk penelitian lanjutan mencakup kombinasi mixed methods, perluasan wilayah, dan sosialisasi lebih baik. Secara praktis, implikasi menekankan pelatihan kompetensi tim kecamatan dan perangkat desa, serta kebijakan kabupaten untuk sinergi pengawasan guna kurangi risiko penyimpangan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriansyah, B., & Paddery. (2022). Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, 8(2), 68–78. <https://doi.org/10.35906/jurakun.v8i2.1065>
- Anggraeni, P. D., & Yuliani, N. L. (2019). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi penganggaran, pengawasan dan peran perangkat desa terhadap pengelolaan dana desa (Studi empiris pada desa se-Kecamatan Kajoran). *UNIMMA Journal*.
- Arianto, A. (2025, Februari 6). Kasus korupsi dana desa Sidodadi Paiton: Eks kades di Probolinggo dituntut 6,5 tahun. *Radar Bromo*.
- Astini, Y., & Widowati, E. (2019). Pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Akuntansi*.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). Sage Publications.
- Dewi, N., et al. (2025). Pengaruh kompetensi aparatur dan pemanfaatan SISKEUDES terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Akuntansi dan Pemerintahan Desa*.
- Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. (2024). *Bahan bacaan pelatihan aparatur desa (PAD)*. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Emzir. (2023). *Metodologi penelitian pendidikan: Kuantitatif dan kualitatif*. Rajawali Pers.
- Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*.
- Indonesia. (2014a). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Indonesia. (2014b). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Indonesia. (2018a). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Indonesia. (2025). *Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029*.
- Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo. (2024). *Laporan hasil evaluasi pengelolaan keuangan desa Kabupaten Probolinggo Tahun 2024*.
- Musleh, A. F. (2025, Januari 25). Terancam lebih lama di tahanan, mantan kades Kalidandan Pakuniran jadi tersangka korupsi dana desa. *Radar Bromo*.
- Ningrum, R. (2024). Pengaruh kompetensi perangkat desa dan kualitas pelaporan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Akuntansi Publik*.
- Noholo, S., & Hippy, A. (2021). Pengaruh kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Ilmu Akuntansi*.
- Saputra, Y., Sari, M. S., & Warisi, D. (2024). Pengaruh transparansi dan kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *AKUNTANSI* 45, 5(1), 56–70.

<https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v5i1.2420>

- Subroto, A. (2009). *Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Studi kasus pengelolaan alokasi dana desa di Desa–Desa dalam wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Tenanggung Tahun 2008)* (Tesis, Universitas Diponegoro).
- Sudaryono. (2021). *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif, dan mix method*. Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Temalagi, S., & Silooy, R. W. (2022). Akuntabilitas, transparansi dan partisipasi terhadap pengelolaan dana desa untuk mewujudkan good governance. *Accounting Research Unit (ARU Journal)*, 3(1), 39–53. <https://doi.org/10.30598/arujournalvol3iss1pp39-53>